

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Jawa Timur 2014-2019. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi dilaksanakan berpedoman pada “payung besar” strategi umum yang menjadi landasan utama pembangunan Jawa Timur 2014-2019.

A. VISI DAN MISI

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 adalah ***"JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN BERAKHLAK"***. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui lima misi yang diberi judul : ***"Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik"***. Judul atau label misi ini merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014), yaitu “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”.

Label “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” yang membingkai lima misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019 tersebut, menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejalan dengan visi, misi, dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih (2014-2019) kepada elemen masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” tersebut, bersifat inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi *wong cilik*, atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara sosial ekonomi.

Wong cilik yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*); terdevaluasi (*devalued*); dan mengalami keterampasan (*deprivation*); serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan,

yang secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.

Lima misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” untuk mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak,” adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan.

Misi 4 : Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme pelayanan publik.

Misi 5 : Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Untuk mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”, melalui lima misi dalam bingkai “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”, dilakukan berlandaskan tiga strategi umum, sebagai berikut:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*).
2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth*, dan *pro-environment*.
3. Pengarusutamaan gender (*pro-gender*).

Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Jawa Timur 2014-2019, sebagai kelanjutan dari pembangunan periode 2009-2014, dengan penegasan

mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), bahwa pembangunan Jawa Timur adalah pembangunan untuk semua, tanpa kecuali, yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan, dan merata.

Strategi umum pembangunan Jawa Timur 2014-2019 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya (*affirmative*) kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, atau disebut *pro-poor growth* (Dollar and Kraay, 2000), yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (*trade-off*) satu terhadap lainnya. Penegasan keberpihakan ini sejalan dengan label misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”, di mana *wong cilik* atau rakyat miskin tidak boleh tertinggal atau ditinggalkan dalam memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Penjelasan lebih rinci mengenai ketiga strategi umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat

Strategi pembangunan berpusat pada rakyat (*people centered development*) menempatkan individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat, dan kekhasan lokal, serta kearifan lokal.

Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang inklusif dilakukan dengan melibatkan, dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat melalui keberpihakan pemerintah (*affirmative*) kepada kelompok yang terpinggirkan atau termarginalisasi, untuk memastikan semua kelompok masyarakat, tanpa kecuali, memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi.

Pembangunan inklusif yang berpusat pada rakyat mengedepankan pemberdayaan rakyat, sekaligus partisipasi rakyat. Partisipasi merupakan proses aktif, di mana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan

menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) di mana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif.

Kemampuan elemen masyarakat yang tertinggal ditingkatkan melalui pengembangan dan dinamisasi potensi yang mereka miliki, atau memberdayakannya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Kemampuan penduduk miskin atau mereka yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya, akan meningkat, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga diri mereka (*nguwongke-wong*), serta terpeliharanya tatanan nilai budaya lokal.

Pemberdayaan sebagai implementasi dari pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya, sehingga partisipasi rakyat akan meningkat menjadi emansipasi rakyat. Tujuan akhir pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, dan membangun kemampuan memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung, dan berdaya saing.

Strategi *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable* tersebut lebih luas dari semata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Konsep ini merupakan strategi pembangunan alternatif, yang menghendaki adanya demokrasi inklusif (*inclusive democracy*), pertumbuhan ekonomi yang memadai (*appropriate economic growth*), kesetaraan gender, dan *intergenerational equity*.

Pengembangan demokrasi harus memiliki dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan memiliki korelasi dengan upaya membebaskan *wong cilik* dari kemiskinan. Dengan pemahaman seperti ini, mengutip pemikiran Amartya Sen, penerima penghargaan Hadiah Nobel bidang Ilmu Ekonomi pada 1998, ide demokrasi secara esensial sangat berkaitan dengan praktik penalaran publik (*public reasoning*).

Penalaran publik dapat diartikan sebagai “alasan seluruh warganegara di dalam masyarakat yang majemuk”, yang dapat memfasilitasi perbedaan pendapat dalam berbagai masalah dengan alasan yang dapat diterima oleh bermacam orang dan/atau berbagai kelompok atau golongan masyarakat. Penalaran publik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan adalah pemerintahan yang senantiasa membuka diskusi publik, yang berlangsung sebagai perluasan kebebasan sipil, kebebasan politik, dan partisipasi, ditunjang oleh berfungsinya perangkat *rule of law* yang menyangga seluruh instrumen pemerintahan yang demokratis.

Demokratisasi yang berkembang dalam ruang sipil dan politik harus menghasilkan perbaikan substansial untuk reformasi hukum, pemerintahan, dan representasi politik. Pemerintahan demokratis harus memiliki kemampuan membongkar berbagai kendala struktural dalam mentransformasikan demokrasi sebagai penalaran publik demi pemajuan hak sosial dan ekonomi rakyat. Tanpa kemampuan itu, demokratisasi substansial yang diidealkan akan mengalami kebangkrutan, yang antara lain, ditandai merebaknya fenomena marjinalisasi, dan makin melemahnya kapasitas, serta kapabilitas masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Di sinilah pentingnya pemahaman ide demokrasi dalam praktik penalaran publik sebagai isi dari hakikat berdemokrasi. Bagaimana kita mampu meningkatkan kapasitas masyarakat miskin untuk mengubah hubungan-hubungan kekuasaan, dan memajukan kebijakan-kebijakan alternatif yang berpihak kepada mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin melalui pembentukan lembaga-lembaga berbasis komunitas lokal, meminjam konsep pemikiran Jurgen Habermas, sebagai “ruang publik deliberatif”, yang sekaligus merupakan sebuah inovasi sosio-kultural yang berbasis pada ruang komunitas lokal untuk memprakarsai perubahan kontekstual.

Melalui “ruang publik deliberatif”, yang dalam bahasa lebih sederhana disebut “musyawarah warga” atau “rembug warga”, dapat dibangun upaya mengaktifkan para individu sebagai warganegara untuk berkomunikasi dan berdialog dalam sebuah ruang publik, yang hasilnya mampu mempengaruhi pengambilan keputusan publik pada level sistem politik. Ruang publik merupakan tempat di mana penalaran publik diuji dan

dikontestasikan. Dari sini bisa dibangun titik awal untuk membangun proses penalaran sebagai cara untuk menghapuskan ketidakadilan.

Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui penggalian masalah lewat dialog dan tukar pengalaman di antara warga. “Rembug warga” atau “ruang publik deliberatif” menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji masalah yang dijumpai di daerahnya melalui penalaran publik, sekaligus menjadi penyambung keterputusan hubungan atau diskoneksi antara institusi formal demokrasi dan para konstituen yang diwakilinya.

Inti dari demokrasi deliberatif adalah partisipasi warga secara langsung, dan tidak mengenal keterwakilan (*representation*), maupun istilah mayoritas dan minoritas. Demokrasi deliberatif mengutamakan kerja sama antar-ide dan antar-pihak. Demokrasi deliberatif, atau demokrasi musyawarah, lebih menonjolkan argumentasi, dialog saling menghormati, dan berupaya mencapai titik temu dan mufakat. Proses demokrasi deliberatif mendorong kompetensi komunikatif warga, yang memungkinkan setiap individu, tanpa kecuali, termasuk kaum marjinal, menyuarakan kebutuhannya.

“Rembug warga” merupakan pengejawantahan demokrasi deliberatif di tingkat lokal, yang memungkinkan terjadinya interaksi, komunikasi, dan dialog antar-warga yang mengedepankan penalaran publik. Pranata “rembug warga” merupakan pengorganisasian swadaya di tingkat komunitas yang menumbuhkan proses penyadaran kolektif, karena peserta “rembug warga” adalah warga aktif yang hadir bukan semata memenuhi undangan, tetapi sebagai pihak yang memiliki agenda itu sendiri.

Membangun “ruang publik deliberatif” merupakan sebuah upaya menemukan “jalan lain” untuk menjembatani demokrasi elitis dan demokrasi partisipatoris, sekaligus sebagai “jalan tengah” atau “struktur tengah” antara sistem politik dan sektor privat. “Ruang publik deliberatif” bisa berfungsi sebagai mata rantai untuk menghubungkan secara horisontal prakarsa masyarakat miskin melalui partisipasi publik langsung. Ini merupakan bentuk demokrasi partisipatoris-deliberatif sebagai alternatif terhadap demokrasi representatif, di mana potensi rakyat miskin bisa diberdayakan melalui “ruang publik deliberatif”.

Ide mengenai demokrasi memiliki korelasi dengan upaya membebaskan rakyat dari kemiskinan, dan mensejahterakan rakyat. Komunikasi, dialog, interaksi publik, dan partisipasi politik merupakan kata kunci dalam praktik demokrasi. Jika demokrasi dipahami sebagai proses penalaran publik yang terbuka, maka pemerintah harus membuka ruang untuk mendengar suara-suara yang berbeda dalam mengupayakan solusi bagi masalah yang dihadapi rakyat secara terbuka, termasuk mendengarkan yang tak terdengar (*hearing the unheard*). Pemerintah tidak boleh menutup katup atau saluran bagi suara-suara yang berbeda, termasuk juga suara-suara yang tak terungkap. Dengan kata lain, kita harus membangun sistem yang menjamin kebebasan rakyat untuk berbicara dan berpendapat yang memiliki korelasi dengan kebebasan dari kemiskinan.

Demokrasi harus memberi ruang kondusif bagi pembangunan agar pembangunan bukan sekadar dipahami sebagai capaian tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir, tetapi juga harus dipahami sebagai pengembangan ekonomi yang menyangkut perhatian pada hakikat kehidupan manusia itu sendiri, dan kebebasan yang dapat mereka nikmati, sebagai sesuatu yang esensial dari ide mengenai pembangunan. Dengan demikian, pembangunan tidak cukup hanya mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pengentasan rakyat miskin, peningkatan pendapatan rakyat yang memperhatikan pemerataan berkeadilan, peningkatan alokasi dana untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya, yang dapat makin memperluas dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kapabilitas rakyat.

Demokrasi juga harus ditekankan pada makna keadilan sosial, terutama konsep keadilan pada gagasan tentang kebebasan, kesetaraan, dan imbalan bagi tindakan yang memberikan sumbangan untuk keuntungan bersama. Prinsip kebebasan harus mengacu pada kebebasan yang setara, di mana prinsip hak dan kewajiban menjadi dasar utama bagi kebebasan.

Paradigma keadilan memiliki dua prinsip, yang pertama, bahwa setiap orang harus memperoleh hak atas kebebasan dasar yang paling luas, dan sejalan dengan kebebasan yang sama bagi orang yang lain. Prinsip ini dibutuhkan untuk menjamin kebebasan dasar, yakni kebebasan berpikir, berkehendak, berpendapat, berkumpul, memilih, kebebasan untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang, hak untuk memiliki jabatan publik, dan kepemilikan

pribadi. Kedua adalah prinsip perbedaan, yang memperbolehkan terjadinya ketidaksetaraan secara sosial dan ekonomi hanya jika memaksimalkan keuntungan bagi rakyat yang paling tidak diuntungkan, dan kesetaraan yang adil dalam memperoleh kesempatan bagi semua. Kesetaraan ini tidak hanya berarti kesetaraan dalam kesempatan kerja, tetapi juga kesempatan hidup. Kalau pun kita harus menerima ketidaksetaraan, seperti perbedaan perolehan keuntungan dalam strata ekonomi, di mana prinsip imbalan menjadi acuan, maka harus melalui cara yang adil, sehingga dalam konteks ini, prinsip keadilan telah berjalan sebagaimana mestinya.

2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*)

Strategi pemberdayaan rakyat melepaskan diri dari perangkat *trade off* pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (*trade-off*) satu terhadap lainnya. Pemerataan akan menciptakan landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan menjamin pertumbuhan berkelanjutan, karena pola pertumbuhan adalah sama pentingnya dengan kecepatan pertumbuhan. Pola pertumbuhan yang tepat bukan yang vertikal, menghasilkan *trickle-down*, seperti yang telah terbukti tidak berhasil, tetapi haruslah yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni *broadly based, employment intensive*, dan tidak terkompartementalisasi.

Pertumbuhan ekonomi yang berjalan serempak dengan pemerataan merupakan pertumbuhan yang ramah bagi penduduk miskin, disebut *pro-poor growth*, yakni pertumbuhan ekonomi yang memperluas kesempatan dan kapabilitas penduduk miskin untuk lebih berpartisipasi, dan memperoleh manfaat lebih besar dari aktivitas ekonomi (Kimenyi, 2006). Sebuah pertumbuhan ekonomi belum cukup dikategorikan sebagai *pro-poor growth* jika hanya menyebabkan menurunnya jumlah penduduk miskin, dengan mengabaikan ketimpangan peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi disebut *pro-poor growth* jika proporsi peningkatan rata-rata pendapatan kelompok penduduk miskin lebih besar daripada proporsi peningkatan pendapatan kelompok penduduk yang tidak miskin (Kakwani and Pernia, 2000).

Strategi *pro-poor growth* secara konseptual memiliki definisi berbeda dengan strategi *pro-poor* dan *pro-growth* yang masing-masing berdiri terpisah, meski di dalam strategi *pro-poor growth* secara implisit juga mengandung unsur *pro-poor*, *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-environment*. Namun ketika keempat unsur tersebut tergabung di bawah konsep strategi *pro-poor growth*, maka melahirkan definisi baru yang berbeda dengan definisi masing-masing unsurnya. Strategi *pro-poor growth* juga bukan sekadar hasil penjumlahan dari keempat unsur tersebut.

Meski demikian, upaya mencapai *pro-poor growth*, tidak dapat dilepaskan dari kandungan unsur strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*, yang masing-masing memiliki kontribusi untuk mewujudkan proporsi peningkatan rata-rata pendapatan kelompok penduduk miskin lebih besar daripada proporsi peningkatan pendapatan kelompok penduduk yang tidak miskin. Pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) harus dapat menciptakan lapangan kerja (*pro-job*), dan pendapatan yang lebih baik bagi semua golongan masyarakat, terutama penduduk miskin (*pro-poor*), serta pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan (*pro-environment*).

Melalui strategi tersebut, diharapkan pertumbuhan dan pemerataan mampu berjalan serempak, sehingga pertumbuhan ekonomi melibatkan, menyentuh, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi semua, termasuk penduduk miskin, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi pada saat yang sama disertai penurunan jumlah penduduk miskin, dan juga penurunan ketimpangan pendapatan.

3. Pengarusutamaan gender (*pro-gender*)

Strategi umum pembangunan Jawa Timur dijalankan dengan pengarusutamaan gender untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, di mana pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi, harus responsif gender. Laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai pelaku (subjek) yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman,

aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dilaksanakan dengan membuka kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, agar dapat memberikan manfaat bagi perempuan yang setara dengan laki-laki.

Ketiga strategi umum tersebut menjadi pijakan utama penetapan dan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan Jawa Timur 2014-2019. Strategi dan arah kebijakan tahun 2017 dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2017

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan	Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, <i>job fair</i> , magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
2. Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kompetensi, serta keterampilan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan usaha produktif melalui kewirausahaan untuk menciptakan tenaga kerja mandiri dan produktif 2. Optimalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) berstandar internasional, serta perluasan skala pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berkualitas
3. Meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi	Peningkatan dan pengembangan kerja sama program transmigrasi dengan provinsi/kabupaten di luar Jawa
4. Meningkatkan pengembangan kapasitas para santri pondok pesantren dalam bidang usaha produktif	Peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, untuk melakukan usaha produktif
5. Meningkatkan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri	Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar negeri melalui pembinaan, perlindungan dan pengawasan terpadu

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
6. Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi untuk menciptakan kesempatan kerja baru 2. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif
7. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Penurunan/penghilangan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan, dan sekolah khusus
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah 2. Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah. 3. Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi
9. Meningkatkan aksesibilitas, dan kualitas PAUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu 2. Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah tertinggal, dan wilayah kepulauan
10. Meningkatkan kualitas, dan layanan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata 2. Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas 3. Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi 4. Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta
11. Meningkatkan minat baca masyarakat	Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu
12. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan
13. Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda	Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	HIV/AIDS
14. Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
15. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan	Peningkatan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa (polindes) menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes) untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan
16. Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas dan jaringannya sesuai dengan standar kesehatan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas, dan jaringannya sesuai dengan standar
17. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan non-medis, serta perbekalan obat-obatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan non medis serta obat-obatan secara merata sesuai dengan standar kesehatan
18. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita	Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" di setiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).
19. Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya	Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya secara merata
20. Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif yang lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengenyampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif
21. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan melalui mekanisme Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) yang komprehensif dan terpadu	Pengembangan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk Jawa Timur
22. Meningkatkan layanan kesehatan bagi penduduk miskin	Peningkatan upaya meminimalkan hambatan keuangan bagi penduduk miskin dan rentan dalam mengakses pelayanan kesehatan
23. Meningkatkan layanan KB, dan kesehatan reproduksi secara komprehensif dan berkelanjutan	Peningkatan dan penguatan revitalisasi program KB untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
24. Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar-sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu ("lokus-fokus")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di Perangkat daerah (PD), sekaligus memperbaiki efektivitas program 2. Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin 3. Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin
25. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil untuk menurunkan tingkat kemiskinan	Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah
26. Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (Kube)	Peningkatan kualitas manajemen Kube yang memiliki kemampuan dan keberdayaan secara sosial maupun ekonomi
27. Mengoptimalkan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar sosial
28. Meningkatkan akses dan fasilitas infrastruktur bagi penduduk miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah 2. Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin
29. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS	Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial
30. Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
31. Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-perbankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UMKM untuk kelancaran pembiayaan usaha 2. Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan idle money 3. Peningkatan perluasan jaringan Bank UMKM dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM
32. Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran 2. Optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi 3. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional 4. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai 5. Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil 6. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk Kopwan dan Koppontren.
33. Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru	Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
34. Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi feminisasi kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan 2. Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan 3. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan 4. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan
35. Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu, dan ikan, untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri)
36. Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Penetapan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
37. Mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir	Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan
38. Meningkatkan pengembangan aneka usaha di kawasan hutan, dan usaha hutan rakyat	Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan
39. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai tambah (<i>value added</i>) sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yang memiliki keterkaitan ke belakang (<i>backward linkage</i>) dan ke depan (<i>forward linkage</i>) pada sebaran lokasi potensial yang merata 2. Pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian lokal yang dapat menyerap tenaga kerja
40. Meningkatkan kualitas proses dan produk pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang terstandarisasi	Peningkatan daya saing produk pertanian, dengan tetap melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada berbagai kawasan perdagangan
41. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan secara berkelanjutan dan terpadu	Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
42. Meningkatkan stok pangan masyarakat	Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, antara lain meliputi daging, beras, gula, kedelai, dan jagung
43. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan	Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal
44. Meningkatkan penanganan keamanan pangan	Pengembangan pengawasan keamanan pangan
45. Meningkatkan kelancaran distribusi pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan 2. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat 3. Peningkatan peran pasar induk dalam distribusi pangan
46. Menjaga stabilitas harga pangan	Pengendalian harga pangan pokok, dan pengembangan sistem informasi pasar (pasokan, harga dan akses)
47. Memperkuat dan memperluas pasar dalam dan luar negeri	Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang
48. Meningkatkan kerja sama ekonomi lokal, regional dan internasional	Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional
49. Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi Puspa Agro menjadi <i>trading house</i> produk pertanian Jawa Timur 2. Perluasan dan peningkatan substansi pameran dagang produk UMKM di pasar domestik maupun internasional 3. Peningkatan performa standarisasi Industri
50. Meningkatkan pengembangan sektor industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki <i>backward</i> dan <i>forward linkage</i> yang tinggi 2. Peningkatan fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil 3. Peningkatan fasilitasi penumbuhkembangan industri pengolahan agro dan non-agro
51. Mengembangkan bahan baku substitusi impor	Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
52. Meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan 2. Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional 3. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata 4. Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing 5. Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat 6. Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar
53. Meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyelenggaraan festival seni budaya lokal pada <i>event</i> nasional dan internasional 2. Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal 3. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air
54. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA 2. Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan
55. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi	Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan
56. Meningkatkan promosi investasi secara terpadu	Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, nasional, dan internasional

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
57. Meningkatkan konektivitas ekonomi melalui ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan transportasi untuk mendukung sentra produksi agropolitan, dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi, serta kawasan andalan untuk mendukung sentra produksi pada 38 simpul kabupaten/kota 2. Pengembangan pembangunan dermaga/transportasi antar-pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama di wilayah Kepulauan Madura, dan pulau-pulau lainnya 3. Pengembangan jalur komuter perkeretaapian, dan pengembangan rel perkeretaapian ganda (double track) 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi jalan
58. 2. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut dan udara yang efisien dan efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem angkutan massal cepat di wilayah regional dan perkotaan berbasis jalan atau rel 2. Pengembangan terminal tipe A, B dan C, serta optimalisasi terminal kargo dan peti kemas 3. Peningkatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum 4. Pengembangan pembangunan pelabuhan khusus 5. Peningkatan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Juanda dan Abdul Rahman Saleh Malang 6. Peningkatan pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpan untuk penerbangan antar-kota (city link)
59. Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi yang layak
60. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah	Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
61. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi waduk, dam, dan embung 2. Peningkatan rehabilitasi kerusakan daerah tangkapan air (catchment area) dan sumber air 3. Peningkatan upaya mempertahankan sumber air, dan merehabilitasi resapan untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
62. Mengendalikan daya rusak air, serta pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan antara lain melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. 2. Peningkatan percepatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan 3. Peningkatan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) 4. Peningkatan pembangunan embung berteknologi geo-membran di lokasi rawan kekeringan, jauh dari sumber air dan kondisi tanah porus, sebagai solusi jangka pendek mengantisipasi bencana kekeringan
63. Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan ketenagalistrikan	Peningkatan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan
64. Meningkatkan pengelolaan pertambangan/ SD Mineral dan Migas	Peningkatan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan Migas
65. Meningkatkan pengelolaan air tanah	Peningkatan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah
66. Meningkatkan penelitian dan pengembangan SD geologi lingkungan dan bencana geologi	Peningkatan nilai tambah/manfaat potensi geologi lingkungan dan Early Warning System (EWS) bencana geologi
67. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan informasi dan komunikasi	Pengembangan informasi dan teknologi tepat guna melalui diseminasi informasi dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat
68. Meningkatkan pengendalian, perluasan, dan rehabilitasi hutan	Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan, dengan memilih tanaman pohon bermasa tumbuh relatif pendek
69. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi	Peningkatan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasokan sumber daya air, di samping untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga air irigasi pertanian rakyat

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
70. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir, dan laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai untuk mengawasi pencemaran air sungai, dan memelihara lingkungan hidup 2. Peningkatan upaya konservasi pesisir dan laut, merehabilitasi ekosistem yang rusak, serta menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
71. Melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Peningkatan koordinasi lintas sektor yang berpotensi menghasilkan emisi GRK, terutama sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah
72. Mengembangkan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah	Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah
73. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi	Fasilitasi Upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur
74. Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar Pemanfaatan ruang di Jawa Timur	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang
75. Peningkatan ketaatan Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Timur	Fasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang
76. Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan	Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya
77. Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional	Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik
78. Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat
	Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
79. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif	Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan <i>up to date</i>
80. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas PD	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SK
81. Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya	Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan
82. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu
83. Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	Peningkatan profesionalisme pengelolaan arsip pemerintah daerah didukung sistem kearsipan yang komprehensif
84. Meningkatkan kualitas dokumen statistik yang akurat dan valid	Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan <i>up to date</i>
85. Memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)	Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis tata kelola pemerintahan, responsiv, transparan dan akuntabel.
86. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana 2. Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam
87. Penyediaan alokasi pendanaan pada saat status darurat bencana (siaga, tanggap, transisi)	Pemenuhan kebutuhan pada saat status darurat bencana yang pendanaannya dialokasikan khusus untuk BPBD yang dititipkan melalui dana BTT (BPKAD) dan pencairannya melalui SK Status Keadaan Darurat Bencana
88. Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. 2. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing 3. Peningkatan revitalisasi dan perbaikan situs-situs religi

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
89. Meningkatkan kerukunan antar-umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan penguatan kerukunan internal, dan antar-umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati 2. Peningkatan jaringan kerja sama lintas umat beragama, dan forum silaturahmi lintas pemuka agama, serta mendorong berkembangnya kerja sama internal dan/atau antar-umat beragama di bidang sosial ekonomi 3. Pengembangan resolusi konflik dalam mengatasi konflik sosial berdimensi agama, suku, ras maupun antar-golongan
90. Memelihara kewaspadaan nasional untuk menangkal upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban	Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba, serta terorisme
91. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan komunitas	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme <i>community policing</i>
92. Meningkatkan aktivitas yang mendorong rasa kebanggaan kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar-sesama melalui pengembangan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan	Peningkatan fasilitasi aktivitas yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, akhlak mulia, serta kemampuan untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur
93. Meningkatkan kualitas, dan pelestarian warisan budaya, serta tradisi lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi budaya dan tradisi lokal untuk mendukung pembangunan partisipatoris berbasis komunitas 2. Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat
94. Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM	Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum
95. Meningkatkan kegiatan forum masyarakat dalam bidang hukum dan HAM	Peningkatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
96. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat/LSM dalam bidang hukum dan HAM	Peningkatan keberdayaan organisasi kemasyarakatan/LSM dalam mencegah, dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran HAM lainnya, sebagai bagian penguatan <i>civil society</i>

C. PRIORITAS DAERAH

Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional, maka tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah **“Pembangunan Yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia Dengan Memperluas dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur serta Peningkatan Pelayanan Publik”**.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada tahun 2017 didasari pada derivasi harmonisasi Program RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 serta RKP tahun 2017. Dilakukan pula dengan mempertimbangkan capaian kinerja dan isu strategis yang berkembang, Aspirasi Masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD yang berkembang di Musrenbang Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan sembilan prioritas dan kegiatan dalam tahun 2017 sebagai berikut:

1) Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan)

Provinsi Jawa Timur mengambil peran menunjang prioritas nasional pada Dimensi Pembangunan Manusia untuk prioritas program Pendidikan dan Kesehatan yang dilakukan melalui kegiatan prioritas antara lain :

- Peningkatan Rasio SMK 70% dan SMA 30% untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dalam mewujudkan Jatim sebagai Provinsi Industri dan mempersiapkan intervensi tenaga kerja terampil dari ASEAN yang bebas masuk ke Jawa Timur. Kondisi eksisting hingga tahun 2015, jumlah SMK yang belum mendapatkan akreditasi sebanyak 1.511 program keahlian. Diperlukan upaya yang konkrit dan cepat agar dapatnya mewujudkan kesiapan tenaga terampil serta akreditasi kelembagaan pengelolanya. Diperlukan pula bantuan sarana penunjang untuk 200 SMK
- Jawa Timur juga dikenal mempunyai cukup banyak sekolah yang berdasar keagamaan (Diniyah-Salafiah) dan sebagian diantaranya dalam penyelenggaraan proses belajar mengajarnya belum terdani baik di Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Adalah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda untuk memberikan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Salafiah serta Guru Swasta (BPPDGS)/BOSDA MADIN. Untuk BPPDGS/Bosda madin terdapat pada

urusan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan melalui bantuan tidak langsung sehingga BPPDGS/Bosda Madin tidak ada pada matrik program SKPD di RKPD. Namun untuk yang di urusan otonomi daerah adalah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Guru Madin yang berada pada Biro Administrasi Kemasyarakatan adalah kegiatan yang berbeda dengan BPPDGS. BPPDGS adalah Bosda Madrasah Diniyah yang sasarannya adalah Ula, Wustha, dan Ustadz/Ustazah Madrasah Diniyah. Sedangkan Fasilitasi Peningkatan kualitas Guru Madin untuk operasional seleksi pemberian beasiswa S 1 bagi guru Madin. Ke depan tersisa permasalahan lulusan Sekolah Diniyah Salafiah yang masih belum bisa tertampung di lembaga pendidikan tinggi formal. Fenomena ini membutuhkan regulasi dari Pemerintah Pusat yang layan didukung Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Bantuan khusus siswa miskin untuk 61.000 siswa, beasiswa 1.150 Guru MADIN serta stimulan bagi penghafal Al Qur'an merupakan bentuk lain dari prioritas Pemerintah Jawa Timur mewujudkan inklusifnya pelayanan pendidikan.
- Dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan, Jatim mempunyai 5.700 Ponkesdes sebagai upaya preventif dalam kesehatan hingga menjangkau wilayah terkecil/perdesaan.
- Selain itu, Jatim juga mempunyai JAMKESDA sebagai solusi permasalahan-permasalahan pelayanan kesehatan, antara lain :
 - a. masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum tercover jaminan kesehatan
 - b. masih ada masyarakat miskin yang tidak tercover menjadi penerima bantuan iuran (PBI) – jaminan kesehatan nasional (JKN)
 - c. terdapat pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS kesehatan termasuk untuk pasien PBI
- Guna menyiapkan generasi unggul, inovasi upaya preventif program kesehatan yang dilakukan sedini mungkin dari usia Balita, baik melalui penguatan & pengembangan 130 dari 12.357 Taman Posyandu termasuk Pos PAUD
- Kegiatan lainnya yang juga menjadi prioritas meliputi bebas pasung, pengendalian dan pemberantasan penyakit Kusta, Frambusia , TBC serta pengendalian HIV AIDS dan AIDS.

2) Pengembangan Kualitas SDM

Penunjang dimensi Pembangunan Manusia utamanya pada prioritas revolusi mental dan pendidikan guna menghasilkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDMI ini di Jawa Timur direncanakan melalui kegiatan :

- Untuk meningkatkan Standar lulusan sekolah menengah serta memberikan ketrampilan (skill) praktis yang diminati dunia kerja dilakukan pula inovasi crash program SMK Mini, terutama bagi santri pondok pesantren, yang menunjang program nasional Santri Go Industri serta dalam menyongsong diberlakukannya MEA. Kegiatan ini disinergikan pula dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) guna mendapatkan sertifikasi sesuai standart dunia kerja (professional). Bidang Keahlian yang dikembangkan meliputi :
 - a) Teknologi dan Rekayasa
 - b) Teknik Informatika & Komunikasi
 - c) Kesehatan
 - d) Agribisnis & Agroteknologi
 - e) Perikanan & Kelautan
 - f) Bisnis & Manajemen
 - g) Pariwisata
 - h) Seni Rupa & Kriya
 - i) Seni Pertunjukan
- Peningkatan SDM juga dilakukan di BLK-BLK bahkan beberapa diantaranya sudah menerapkan standart Internasional. Khusus untuk pegawai melalui diklat teknis dan kepemimpinan yang di tahun 2017 akan dilakukan kepada 1.040 orang dan Assessment Komplek (Job target) terhadap 120 pegawai.
- Agar terwujudnya good government dilakukan melalui reformulasi konsep Reformasi Birokrasi ala Jawa Timur yang tidak sekedar pembenahan pada sisi administrasi saja, namun juga pada revolusi mental manusia dan perangkat pendukungnya seperti skema berikut :

- Dilakukan pula kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah agar pertanggung-jawaban kinerja dapat mencapai standart nilai tertinggi (Sangat memuaskan/A); Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur serta Fasilitas dalam rangka Inovasi Pelayanan Publik.

3) Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Prioritas program dan kegiatan yang direncanakan bisa mengurangi tingkat prosentase kemiskinan dan pengangguran sudah dimulai sejak tahun 2009 yang terintegrasi dari program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota dalam kluster ruang serta kluster program. Keberhasilan Program JALINKESRA di tahun 2009-2014 dilanjutkan dengan merubah menjadi Program JALINMATRA dimana pola integrasi diantara kegiatan dalam program ini lebih banyak dan saling terkait yang diharapkan agar dampak pengurangan-nya bisa mengena pada akar masalah yang lebih multidimensi. Kegiatan-kegiatan tersebut di tahun 2017 antara lain :

- JALINMATRA Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (B-RTSM) untuk 11.054 RTSM di 69 desa pada 22 Kecamatan di 12 Kabupaten.
- JALINMATRA Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) untuk 24.008 KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) di 668 desa pada 176 Kecamatan di 35 Kabupaten
- JALINMATRA penanggulangan kerentanan kemiskinan (PK2) untuk 250 DESA di 29 Kabupaten.
- Program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Anti Poverty Program (APP), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Rusunawa serta pembangunan prasarana MCK Komunal

Sedangkan pada kegiatan yang lebih mengarah kepada pengurangan pengangguran disamping dari memperbanyak peluang kesempatan kerja, juga dilakukan melalui kegiatan antara lain :

- Penguatan BLK menjadi BLK Internasional juga dicapai melalui pola-pola magang dan inkubator.

- Pengembangan inovasi pelayanan penempatan kerja
- Pelayanan informasi magang dan pelatihan kerja berbasis kompetensi
- Gerakan Cegah PHK, serta
- Pengawasan penegakan hukum dan perlindungan tenaga kerja.

4) Pengembangan Industri dan Perdagangan

Guna menunjang dimensi Sektor Unggulan utamanya pada sektor Industri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Himpunan Kawasan Industri pada prinsipnya telah menyiapkan lahan untuk kawasan Industri besar dengan luasan 27.084 Ha pada 10 Kabupaten/Kota, dimana 2.220 Ha diantaranya sudah terpakai. Sedangkan untuk IKM pengembangannya dilakukan melalui sentra industri dengan segala fasilitasi infrastrukturnya.

Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih besar kepada pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang dilakukan melalui Program Pengembangan 2.629 IKM agro Paripurna. Program ini dilakukan holistic baik dari jaminan ketersediaan bahan baku, pengolahan hingga tersedianya produk jadi serta fasilitasi pemasaran.

- Konsepsi ini diperkuat dengan standardisasi 1.500 produk IKM Jawa Timur.
- Inovasi pengembangan produktivitas wirausaha agro industri juga dilakukan Pemerintah Provinsi mulai tahun 2016 dengan berupaya mengkonkritkan 3 Aspek Utama Ekonomi baik melalui (1) penyediaan bahan baku dengan peningkatan produksi/produktivitas bahan baku terutama pada Industri Agro (2) mensinergikan dengan aspek pembiayaan melalui system perbankan seperti APEX Bank dan/atau *loan agreement* antara Pemerintah Provinsi, Bank Jatim, Bank UMKM dan BPR Kabupaten/Kota dalam memberikan kredit dengan bunga murah 9% kepada Industri Primer; jika yang akan melakukan kredit usahanya *feasible* namun tidak *bankable* karena tidak memiliki agunan maka diselesaikan dengan ikut serta pada skema pembiayaan jaminan kredit daerah melalui PT. JAMKRIDA (3) menyediakan fasilitasi pemasaran baik melalui pasar local setempat atau Pasar lelang agribis (jika dimanage kelompok dan berorientasi ekspor antar wilayah) di Pasar Induk Agrobisnis (Puspa Agro) serta bisa pula melalui 26 Kantor Perwakilan Dagang Jawa

Timur di Provinsi mitra. Konsep penyediaan pasar dan penguasaan pasar domestik dari output sektor Pertanian dan IKM di Jawa Timur ini jika di skemakan dapat dilihat seperti gambar berikut :

Gambar 2.1 Skema Pengembangan Industri Primer



5) Pengembangan Koperasi dan UMKM, serta Kelembagaan Pembiayaan.

Program/Kegiatan prioritas yang mendukung dimensi Pemerataan dan Kewilayahan utamanya pada program Pemerataan antar Kelompok Pendapatan yang di Jawa Timur kelembagaannya dilakukan melalui Program Pengembangan Koperasi dan UMKM ini diprioritaskan pada kegiatan-

kegiatan yang antara lain meliputi :

Pengembangan koperasi dan UMKM

dilakukan melalui penumbuhan

Lembaga Keuangan Mikro (untuk

usaha mikro) antara lain dengan

penguatan 2.000 Koperasi Wanita,

Kopontren, Koperasi Karyawan,

Lembaga Masyarakat Desa Hutan



(LMDH) dan pengembangan LKM berbasis Fungsional yang setiap tahun dialokasikan bantuan penguatan permodalan untuk 2.000 LKM @ 25 juta dan guna merealisasikan gerakan syariah lebih nyata, dilakukan melalui pembentukan Koperasi Wanita Syariah.

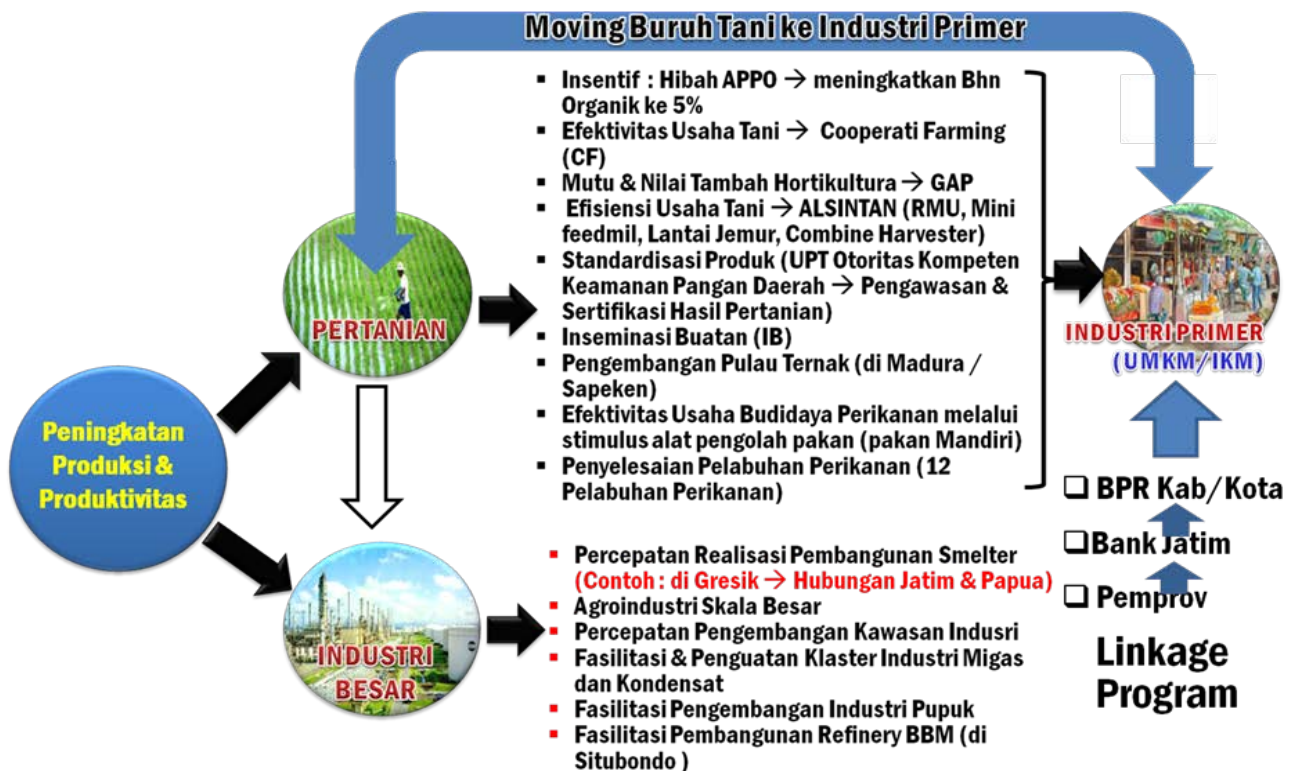
- Spin Off pada unit usaha Bank Jatim menjadi Bank Jatim Syariah, dilakukan untuk memantapkan gerakan ekonomi syariah di Jawa Timur.
- Membangun BPR Kabupaten/kota Menjadi linkage dengan Provinsi dengan pemberian suku bunga murah untuk memperkuat perekonomian, karena dari 20 juta tenaga kerja di Jawa Timur 906.000 masih menganggur, 92 % diserap UMKM. Apabila tidak difasilitasi kredit murah maka beban pengangguran akan bertambah besar.
- Dilakukan pula pengembangan Inkubator Bisnis untuk 3.000 UKM, Pemagangan 1.000 UKM ke Profesional UKM Ekspor dan 250 UKM diikutkan pada promosi/akses pasar UKM Dalam & Luar Negeri serta penguatan SMESCO Business Development Centre.

6) Peningkatan Kedaulatan Pangan

Penopang pada dimensi Sektor Unggulan utamanya program Kedaulatan Pangan ini, dilakukan di Jawa Timur melalui prioritas kegiatan antara lain :

- Peningkatan Produksi/Produktivitas tanaman pangan strategis. Dari target Jatim menopang 50 % target surplus pangan nasional (padi 10 juta Ton), di tahun 2015 surplus komoditas utama di Jawa Timur telah tercapai kinerja :
 - Padi mengalami surplus 4,94 Juta ton
 - Jagung mengalami surplus 3,4 juta ton
 - Kedelai defisit 46,9 Ribuan ton
- Prioritas kegiatan lainnya adalah Stimulus Peningkatan Produksi sektor primer dan sekunder, seperti tergambar pada skema berikut :

Gambar 2.2 Stimulasi Peningkatan Produksi Sektor Primer dan Sekunder di Jawa Timur



- Stimulasi melalui konsep peningkatan produksi dan produktivitas di sektor pertanian akan memberikan dampak keterkaitan ke depan (forward linkage) kemudahan bahan baku industri agro yang mendominasi struktur industri di Jawa Timur.
- Untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian tanaman pangan ini alat mesin pertanian yang dibantu meliputi 175 unit transplanter, 47 unit cultivator, pompa air 22 unit, 32 unit hand traktor. Sedangkan untuk meningkatkan nilai tambah alat mesin yang diperbantukan meliputi 150 unit combine harvester, 10 unit pembangunan packing house, 10 unit sarana packing house, 3 unit vacuum frying.
- Sertifikasi bibit unggul pertanian di tahun 2017 direncanakan untuk 27.500 ton benih tanaman pangan, 300.000 pohon benih hortikultura dan 12.000 ton benih sayuran.

- Pengembangan Cooperative Farming dilakukan pada 28 Kelompok yang tersebar se Jawa Timur serta penerapan Good Agricultural Practices (GAP) hortikultura direncanakan untuk 62 unit (pembinaan & pengawalan proses budidaya sampai dengan sertifikasi produksi hortikultura)
- Dalam konteks yang lebih makro untuk meningkatkan kedaulatan pangan, dilakukan peningkatan Indek Pertanian (IP) melalui Pembangunan Waduk beserta jejaring irigasi yang bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota menurut kewenangannya masing-masing. Waduk yang telah terbangun meliputi : Waduk Bajulmati di Banyuwangi, Nipah di Sampang, Jabung Ring Dyke (tuban), Bendung Gerak Sembayat di Gresik, Upaya ini telah berhasil meningkatkan IP : 1,86 menjadi 2,31 di tahun 2015 dan diharapkan bisa mencapai IP : 2,86 di tahun 2019.
- Kegiatan lainnya adalah pemanfaatan kebun dan pekarangan melalui pengembangan Karang Kitri di 200 desa dan Kawasan Rumah Pangan Lestari di 114 desa.
- Di ranah perkebunan dilakukan intensifikasi tanaman tembakau (kualitas Kadar TAR rendah) pada lahan 7.000 Ha; Pengembangan Tanaman Kakao 4.000 Ha dan Pengembangan Kopi Arabika seluas 2.000 Ha serta pengembangan kebun bibit Tebu seluas 48 Ha (kebun bibit datar 40 Ha; kebun bibit induk 7 Ha; kebun bibit nenek 1 Ha).
- Untuk Peternakan dilakukan :
 - Optimalisasi Inseminasi Buatan guna mendukung Swasembada Daging Nasional melalui 1.300.000 akseptor (Pemeriksaan kebuntingan, asistensi teknologi reproduksi, dan maintenance Inseminasi Buatan dan penyediaan N2 Cair 350.000 liter).
 - Pengadaan bibit ternak ditahun 2017 dilakukan pada Sapi PO : 127 ekor betina, 10 ekor jantan; Sapi Madura : 16 ekor betina, 2 ekor jantan; Domba Sapudi 80 ekor betina, 10 ekor jantan; Kambing Senduro : 80 ekor betina, 10 ekor jantan.
 - Untuk peningkatan populasi ternak dilakukan dengan pengadaan Sapi PO : 660 ekor betina; Sapi Perah : 120 ekor betina; Kambing Senduro 300 ekor betina, 30 ekor jantan, Kambing Kacang : 500 ekor betina, 60 ekor jantan; kelinci 440 ekor.

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga membantu dengan memberikan suku bunga yang murah (4%) yang nantinya dilaksanakan dengan kerjasama berbagai pihak seperti penggunaan lahan nganggur Kodam dan angkatan laut untuk peternakan sapi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan persentase pertumbuhan Sapi Potong dari semula 6,18% per tahun pada periode 2009-2013 menjadi 6,26% pada periode 2014 - 2018.

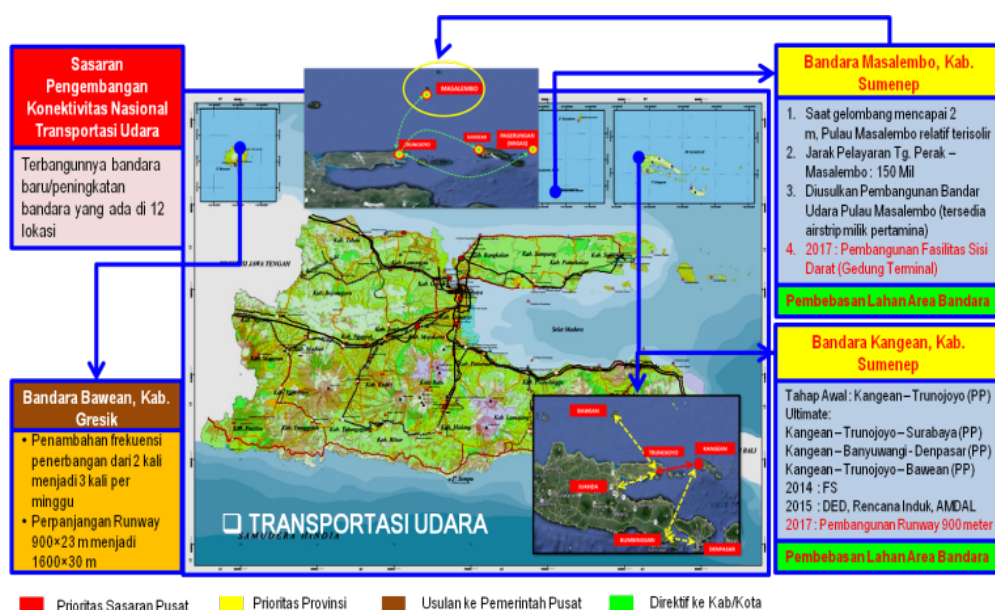
7) Peningkatan infrastruktur

Peningkatan Infrastruktur dalam rangka mendukung Konektivitas Nasional dan antar wilayah di Jawa Timur dilakukan guna memicu kembali terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi serta mengurangi disparitas antar wilayah. Infrastruktur yang diprioritaskan meliputi :

➤ Transportasi Udara :

Direncanakan untuk membangun bandara baru/peningkatan bandara yang ada di 12 lokasi (lihat Gambar 5.6). Kegiatan ini juga diikuti dengan pembangunan akses baru/peningkatan jalan akses menuju bandara. Mengingat keterbatasan anggaran, maka prioritas peningkatan bandara difokuskan pada Bandara Abd. Rahman Saleh Malang dan Bandara Kangean, Sumenep.

Gambar 2.3. Peta Tematik Rencana Pengembangan Transportasi Udara Tahun 2017

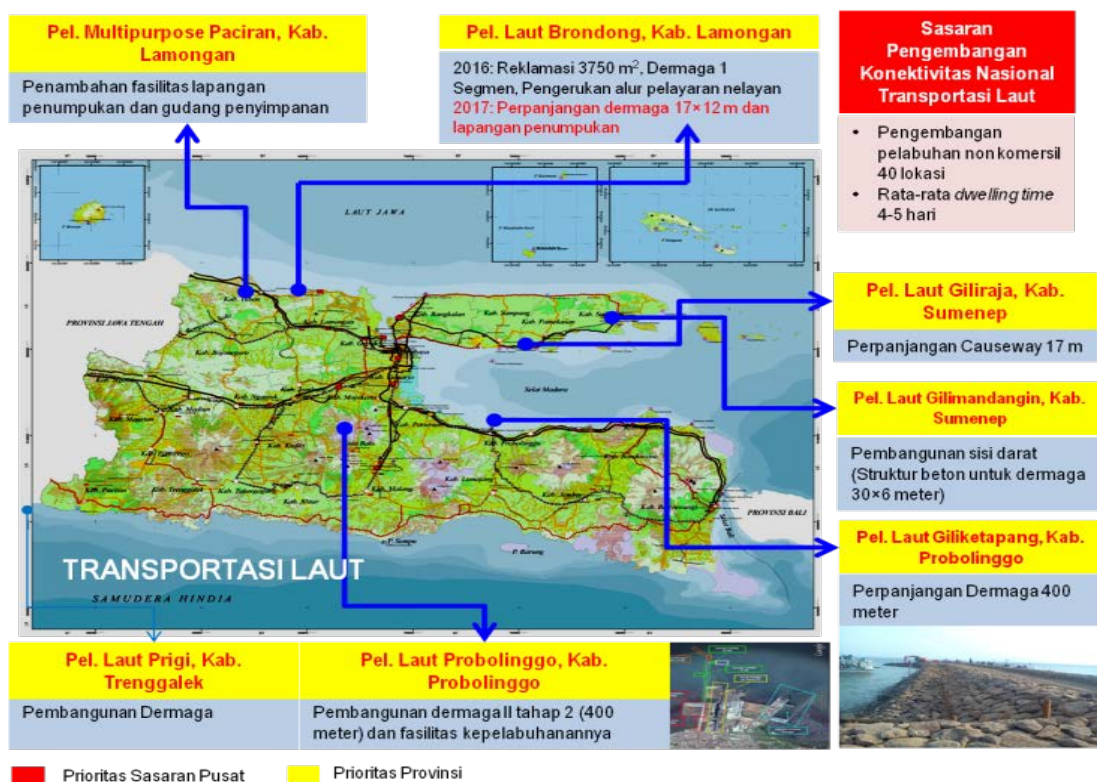


➤ Transportasi Laut :

- Pengembangan pelabuhan non komersil 40 lokasi dengan rata-rata *dwelling time* 4-5 hari untuk pelabuhan Tanjung Perak.
- Pembangunan Dermaga
- Penambahan lapangan penumpukan barang
- Pembangunan/peningkatan akses jalan menuju pelabuhan

memperluhatkan pete lokasi rencana pengembangan transportasi laut yang diharapkan bisa terpenuhi dalam tahun 2017. Namun, sehubungan dengan terbatasnya anggaran, maka rencana pengembangan lebih difokuskan pada pembangunan pelabuhan laut di Lamongan, Giliyang, Gilimanuk dan Probolinggo, kampanye keselamatan laut dan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan laut di Jawa Timur.

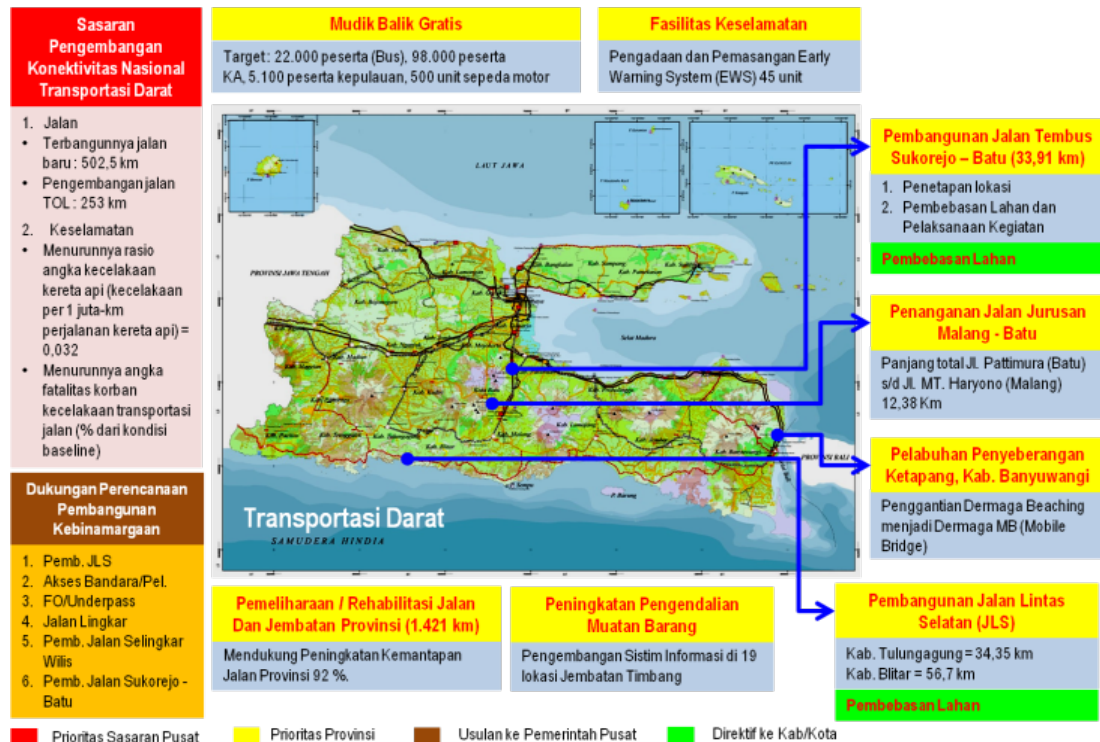
Gambar 2.4 Peta Tematik Rencana Pengembangan Transportasi Laut 2017



➤ Transportasi darat :

- Terbangunnya jalan baru : 502,5 km
- Pengembangan jalan Tol : 253 km,
- Peningkatan dan Perbaikan jalan & Jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi, seperti tergambar pada peta Tematik pada Gambar 5.8.

Gambar 2.5 Peta Tematik Rencana Pengembangan Transportasi Darat 2017



- Percepatan pembangunan JLS dengan realisasi fisik 365,28 km (53,97%). Didorong tahun ini di Popoh hingga Malang. Diperlukan anggaran Rp 2,09 Triliun. Tahun depan akan disusun DED untuk pembangunan akses jalan dari Pacitan ke Malang guna mendukung bandara yang ada di Malang
- Pembangunan Fly Over/Underpass di Kota Besar dan Metropolitan
- Jalan Lingkar di Kota Besar – Sedang.
- Pembangunan Jalan Regional Selingkar Wilis
- Pembangunan Jalan Sukorejo - Batu (mengatasi kemacetan Megapolitan Surabaya – Malang Raya)
- Peningkatan infrastruktur Kangean dan Masalembu.

- Fasilitasi pembangunan Kilang Minyak & Gas Bumi di Kabupatren Tuban untuk minyak dan gas.
- Pembangunan pelabuhan Prigi untuk pelabuhan nusantara.
- Pembangunan Jalur KA Double track Surabaya sampai Banyuwangi.
- Melanjutkan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Keterbatasan anggaran, sekali lagi, membuat fokus pengembangan transportasi darat juga harus dibatasi. Fokus pembangunan sarana-prasarana transportasi darat diletakkan pada pengembangan jalan di beberapa kabupaten/kota saja.

8) Kemaritiman dan Kelautan

Penopang dimensi Sektor Unggulan Nasional, utamanya pada program Kemaritiman dan Kelautan ini dilakukan di Jawa Timur melalui Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya. Pada Program Perikanan Tangkap dilakukan melalui prioritas :

- Pemulihan Sumber Daya Ikan melalui :
 - Pembangunan 20 paket Rumah Ikan di Banyuwangi, Probolinggo dan Situbondo,
 - Under Water Restocking Laut 300.000 ikan Kerapu di Banyuwangi, Situbondo, Kab. dan Kota Probolinggo, Tuban ; dan
 - Restocking 5 Juta Benih Ikan Tobro, Tawes, Wader di Perairan Umum Darat
 - Rehabilitasi Mangrove 85 Ha dan terumbu karang 12 Ha.
- Pemberian bantuan sarana Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang ramah lingkungan kepada nelayan di 22 Kabupaten/Kota berpantai;
- Pembangunan dan penyempurnaan Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Popoh dan Pancer.
- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
- Fasilitasi, eksploitasi dan aplikasi teknologi perikanan tangkap
- Pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan PPI

- Pengembangan Budidaya Perikanan melalui pengembangan alat pakan mandiri sebanyak 100 paket pakan mandiri yang terdiri dari mesin extruder (pengapung pelet) pencampur, pengaduk, dan formulasi bahan baku pakan ikan.
- Pengembangan Minapolitan, seperti tergambar pada peta berikut :

Gambar 2.6 Peta Pengembangan Kawasan Minapolitan di Jawa Timur



9) Harmonisasi Sosial

Pemantapan wawasan kebangsaan (wasbang) bagi masyarakat Jawa Timur melalui fasilitasi FKDM, FKUB dan FPK dengan kegiatan :

- Antisipasi Perkembangan gerakan kelompok masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila di Jawa Timur
- Pembinaan karakter bangsa (pemuda) berbasis kualitas moral dan nasionalisme (caracter building)
- Membangun Kembali Karakter Bangsa dan Membersihkan Diri Sendiri dari Berbagai Prasangka Sosial-Kultural-Politik
- Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
- Membangun Kembali Karakter Bangsa dan Membersihkan Diri Sendiri dari Berbagai Prasangka Sosial-Kultural-Politik

- Sinergi dengan TNI/POLRI, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat melalui Optimalisasi Fungsi Babinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa dalam rangka pencegahan meluasnya gerakan yg meresahkan masyarakat
- Revitalisasi budaya dan kearifan local.